

**MANIFESTO 'ENDOG ABANG' SEBAGAI STRATEGI POPULISME PARTAI
UMMAT DALAM PEMILU 2024**

Iskandar Iskandar¹, Caroline Paskarina², Ari Ganjar Herdiansyah³

^{1,2,3}Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: iskandar21001@mail.unpad.ac.id

Email: caroline.paskarina@unpad.ac.id; ari.ganjar@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the relationship between populism theory and the Ummat Party, with a focus on political identity, anti-elite narratives, mass mobilization, and the programs offered by the party. The research also aims to understand the Ummat Party's strategic approach in dealing with the cultural regime and voicing criticism of the national regime. The object of this research is the Ummat Party, especially in the context of the Yogyakarta Special Region (DIY), with an emphasis on the Endog Abang Manifesto as a representation of the party's political ideology and strategy. The research method used is text and content analysis, by collecting and analyzing information from various sources such as speeches, manifestos, interviews and related literature. A qualitative approach is used to explore an in-depth understanding of the relationship between populism theory and the Ummat Party. The research results show that the Ummat Party uses populism theory as an ideological and strategic basis in mobilizing the masses, especially through Islamic political identity, anti-elite narratives, and offering programs that prioritize social and economic justice. The Endog Abang Manifesto became a symbol of this approach, combining local identity with the values of justice championed by the Ummat Party. This research concludes that the Ummat Party is a real example of the theory of populism in the Indonesian political context. They combine Islamic identity, criticism of political elites, mass mobilization, and the offer of programs focused on social and economic justice. The Ummat Party's strategic approach in dealing with the cultural regime also shows caution and consistency in voicing criticism and formulating desired changes in society.

Keywords: Political populism, Ummah Party, Islamic political identity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara teori populisme dengan Partai Ummat, dengan fokus pada identitas politik, narasi anti-elit, mobilisasi massa, dan program-program yang ditawarkan oleh partai tersebut. Penelitian juga bertujuan untuk memahami pendekatan strategis Partai Ummat dalam menghadapi rezim kultural dan menyuarakan kritik terhadap rezim nasional. Objek penelitian ini adalah Partai Ummat, khususnya dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan penekanan pada Manifesto Endog Abang sebagai representasi dari ideologi dan strategi politik partai. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis teks dan konten, dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti pidato, manifesto, wawancara, dan literatur terkait. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang hubungan antara teori populisme dan Partai Ummat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Ummat menggunakan teori populisme sebagai landasan ideologis dan strategis dalam memobilisasi massa, terutama melalui identitas politik Islam, narasi anti-elit, dan tawaran program-program yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi. Manifesto Endog Abang menjadi simbol dari pendekatan ini, dengan menggabungkan identitas lokal dengan nilai-nilai keadilan yang diperjuangkan oleh Partai Ummat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Partai Ummat merupakan contoh nyata dari teori populisme dalam konteks politik Indonesia. Mereka menggabungkan identitas Islam, kritik terhadap elit politik, mobilisasi massa, dan tawaran program-program yang berfokus pada keadilan sosial dan ekonomi. Pendekatan strategis Partai Ummat dalam menghadapi rezim kultural juga menunjukkan kehati-hatian dan konsistensi dalam menyuarakan kritik dan merumuskan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Populisme politik, Partai Ummat, Identitas politik Islam.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



PENDAHULUAN

Dalam skala nasional Pemilihan Umum 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 18 partai politik sebagai peserta dari 75 partai yang terdaftar di KPU (CNN Indonesia, 2022). Diantara 18 partai yang terpilih tersebut adalah 4 partai politik baru yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024, yaitu Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Kemunculan partai-partai baru di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari negara yang mengikuti sistem demokrasi, mencerminkan keragaman ideologi politik yang mendasarinya. Untuk menjadi kontestan pemilu yang signifikan di tengah persaingan ketat, partai-partai baru memerlukan strategi-posisi yang dapat dengan cepat mendapatkan simpati publik, dengan menggunakan berbagai strategi politik (Breyer, 2022).

Salah satu partai baru dalam pemilu 2024 adalah Partai Ummat. Di situs web resminya, <https://partaiummat.id/id/>, Partai Ummat menegaskan dirinya sebagai partai yang melakukan kampanye, menyatakan, "dengan pergi dan berbicara dengan penduduk lokal, kita dapat mempelajari tentang masalah yang mempengaruhi mereka, dan ketika orang memberitahu kita bahwa mereka ingin melihat perubahan tertentu, kita berusaha untuk membuatnya terjadi." Partai Ummat menggunakan slogan "Bertarung Melawan Penindasan dan Menegakkan Keadilan" dan logo partai yang dinamai "Perisai Tauhid," menegaskan dirinya sebagai partai identitas Islam dan menggunakan strategi populis untuk mendapatkan dukungan massa (Rais, 2021). Partai Ummat memvisualisasikan, "Realisasi Indonesia sebagai Negara yang Diberkati dengan Tuhan sebagai Tuhan Yang Paling Penyayang, dengan menegakkan Nilai-Nilai Ilahi, Persaudaraan (Ukhuwah), Kebebasan (Hurriyah), Kesetaraan (Musawah), dan Keadilan ('Adaalah) dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Ummat, 2021).

Fenomena munculnya partai baru, mengutip (Harmel & Robertson, 1985), merupakan respons masyarakat untuk mengatasi isu-isu baru dan bertujuan untuk mengubah kondisi yang sebelumnya diinisiasi oleh peristiwa sejarah dan mampu memasuki sistem partai yang sudah ada. Untuk lebih menekankan hal ini, (Mair, 1990) dan (Erlingsson, 2005) mendefinisikan partai baru sebagai partai yang sebelumnya bukan anggota dari sistem partai yang sudah ada. Selain itu, kedua peneliti tersebut menjelaskan tiga proses munculnya partai baru: pertama, partai baru muncul dari penggabungan dua atau lebih partai. Kedua, partai-partai muncul melalui pembagian partai, dengan kemungkinan partai induk bubar atau tetap ada. Ketiga, partai-partai yang benar-benar baru (Bolin, 2007). Agar partai-partai baru dapat memasuki sistem partai dan bersaing dalam kontes politik formal, strategi politik diperlukan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan populisme, baik dalam hal figur (figur politik) maupun populisme partai, seperti yang dilakukan oleh Partai Ummat.

Di sisi lain, strategi populis di Indonesia bukanlah fenomena baru. Perkembangan populisme di Indonesia dapat dibagi menjadi dua tema utama, di mana populisme nasionalis sekuler dan populisme agama berorientasi Islam saat ini mendominasi ruang kontestasi politik di antara elit politik dan pemilihan (Hadiz, 2018). Populisme menjadi strategi yang signifikan, terutama menjelang kontes pemilu. Sebagai contoh, dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, kedua kandidat menggunakan strategi populis dengan gaya yang berbeda. Prabowo menggunakan populisme gaya lama, merangkai narasi sebagai pribumi versus asing atau populisme konfrontatif melawan Jokowi, sedangkan Jokowi menggunakan bentuk populisme baru, memposisikan dirinya sebagai jawaban bagi massa untuk memecahkan status quo atau yang disebut populisme intra-sistemik (Mietzner, 2015).

Populisme telah menjadi fenomena umum di seluruh dunia sebagai hasil dari demokratisasi yang sering dikaitkan dengan antagonisme moral. Namun, menurut Nadia Urbinati, populisme adalah bagian dari demokrasi (Urbinati, 2019), sesuatu yang diharapkan dalam kontes demokratis, dan keberadaannya tidak dapat dihindari, terutama untuk demokrasi murni yang memprioritaskan kedaulatan dan kesetaraan rakyat. Menurut (Mietzner, 2020), dalam perkembangan populisme di Indonesia sejak tahun 2010-an, telah terjadi perubahan dalam aktor-aktor populis yang terdiri dari tiga aktor: Chauvinis, Islamis, dan Teknokrat. Selain itu, kondisi Indonesia memberikan tanah yang subur bagi pertumbuhan populisme di tengah upaya untuk meningkatkan stabilitas politik, karena empat kriteria: (a) latar belakang agama-ras, regional, dan kelas sebagai identitas pemisah yang berbeda, (b) politisasi disparitas sosioekonomi dalam kelompok-kelompok ini, (c) minoritas ditargetkan untuk kampanye mobilisasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



populis, dan (d) keinginan untuk mendirikan partai untuk membantu populis mencapai perubahan politik yang signifikan. Mengenai kriteria pertama, dalam latar belakang agama-ras, regional, dan kelas sebagai identitas pemisah yang berbeda, Partai Ummat menggunakan narasi politik "Islam" yang kuat sebagai bentuk resistensi terhadap narasi yang mencemarkan posisi komunitas agama dalam politik nasional. Selain itu, dalam konteks politik lokal DIY, DPW Partai Ummat Yogyakarta menggunakan narasi populis anti-elite yang ditunjukkan melalui manifesto "Endog Abang" yang mengkritik posisi bias antara raja sebagai posisi budaya dan Gubernur sebagai kepala daerah, yang sering kali mendasarkan kebijakannya pada kepentingan budaya yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam kriteria kedua, politisasi disparitas sosioekonomi jelas terlihat dalam manifesto "Endog Abang". Dalam manifesto DPW Partai Ummat Yogyakarta, mereka mengkritik implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 mengenai status khusus Yogyakarta, yang tidak didasarkan pada kesejahteraan dan keadilan sosial, khususnya dalam penggunaan Dana Khusus. Partai Ummat menyebutkan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial (rasio Gini) di DIY, yang melebihi rata-rata nasional, dan kerugian ekonomi lokal. Melalui hal ini, Partai Ummat telah berhasil mempolitikasi isu disparitas sosioekonomi dengan menyatakan bahwa Partai Ummat bersama, dalam narasi populis disebut sebagai 'rakyat' atau anti-elit, dimanfaatkan sebagai mobilisasi politik.

Dalam kriteria ketiga, minoritas yang ditargetkan untuk mobilisasi populis adalah kelompok-kelompok marginal yang merasa tidak diakui oleh kekuatan dominan. Dalam hal ini, target kampanye populis Partai Ummat Yogyakarta adalah pertama-tama kelompok Islam dengan narasi politik identitasnya dan kedua, komunitas rentan yang tidak merasa kesejahteraan dan keadilan sosioekonomi karena pemerintahan Sultan sebagai Gubernur. Melalui kriteria ini, Partai Ummat memanfaatkan ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok minoritas untuk mobilisasi politik.

Kriteria keempat adalah keinginan untuk mendirikan partai untuk membantu populis mencapai perubahan politik yang signifikan, konsisten dengan pendirian Partai Ummat sebagai partai baru sebagai cara bagi figur populisnya, dalam hal ini, Amien Rais, untuk mencapai tujuan politiknya. Pendirian Partai Ummat tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah dijelaskan dalam kriteria pertama, yaitu sebagai bentuk resistensi terhadap narasi yang mencemarkan posisi komunitas agama dalam politik nasional dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks populisme sebagai strategi politik, partai-partai sebagai organisasi politik memainkan peran penting dalam mobilisasi politik. Dalam mobilisasi politik mereka, Partai Ummat menciptakan program-program yang merupakan program kewirausahaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di masyarakat DIY.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk lebih mendalami fenomena partai politik baru, dengan fokus khusus pada manifesto "Endog Abang" oleh Partai Ummat di wilayah Yogyakarta. Dengan menganalisis manifesto ini dalam konteks yang lebih luas dari populisme politik, disparitas sosioekonomi, dan mobilisasi minoritas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi strategis Partai Ummat dan implikasinya terhadap kontestasi politik di Indonesia. Melalui pemeriksaan ini, kami bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik partai dan strategi populis dalam demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti mendalami pemahaman terhadap Strategi Populis Partai Ummat sebagai Peserta Baru dalam Pemilihan Umum 2024, dengan fokus pada kegiatan Partai Ummat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk secara komprehensif memahami kompleksitas masalah manusia dan sosial yang melekat dalam strategi politik. Mengacu pada definisi J.W. Creswell, penelitian kualitatif mencari pemahaman nuansa atas masalah-masalah ini, menangkap perspektif-perspektif terperinci dari berbagai sumber dalam konteks alamiah mereka (Creswell, 1998). Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan analitis, bertujuan untuk secara sistematis menggambarkan isu-isu dan fenomena yang saling terkait dengan pertanyaan penelitian. Dengan memanfaatkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, peneliti berusaha memberikan analisis yang menyeluruh terhadap strategi populis Partai Ummat dalam konteks Yogyakarta. Melalui pendekatan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



studi kasus, penelitian bertujuan untuk menelusuri secara mendalam fenomena utama yang mengelilingi strategi Partai Ummat dalam pemilu 2024, menjelaskan rumitnya manuver-manuver politiknya dan implikasinya. Lokasi penelitian yang dipilih untuk studi ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, dipilih karena signifikansinya sebagai tempat lahirnya Partai Ummat, tempat tinggal banyak kandidat legislatif, dan hubungannya yang historis dengan Muhammadiyah, pengaruh yang penting dalam partai tersebut.

Dalam menentukan informan, digunakan pengambilan sampel bertujuan, yang memungkinkan pemilihan individu dengan pengetahuan dan otoritas yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap strategi politik Partai Ummat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi melibatkan keterlibatan langsung dengan program-program Partai Ummat dan observasi tidak langsung melalui saluran media. Wawancara dilakukan dengan tokoh politik kunci dalam Partai Ummat untuk mendapatkan wawasan terhadap proses pengambilan keputusan strategis mereka. Selain itu, studi dokumentasi melibatkan pengumpulan materi-materi yang relevan seperti data statistik, struktur organisasi, dan detail program untuk melengkapi temuan penelitian.

Table 1.
Kriteria dan indikator

Kriteria	Indikator
Identitas Pembeda	a. Narasi politik Identitas Islam b. Narasi populis anti- elit
Kesenjangan Sosial -Ekonomi	a. Politisasi kesenjangan isu social dan ekonomi b. Kesejahteraan dan keadilan
Target Mobilisasi	a. Mobilisasi terhadap kelompok Masyarakat Islam b. Mobilisasi terhadap kelompok masyarakat rentan yang tidak merasakan keadilan sosial dan ekonomi
Pendirian Partai/Ketersediaan Program	a. Ketercapaian perubahan politik b. Program-program Partai Ummat

Sebagai instrumen utama pengumpulan dan interpretasi data, peneliti memainkan peran penting dalam memastikan kualitas dan validitas hasil penelitian. Analisis data mengikuti proses sistematis reduksi, tampilan, dan penarikan kesimpulan, yang dipandu oleh kerangka kerja Miles dan Huberman (Moleong, 2012). Melalui triangulasi sumber data, teknik, dan waktu, penelitian bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuannya. Secara keseluruhan, studi ini berusaha untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang Strategi Populis Partai Ummat saat menjelajahi lanskap politik Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Manifesto Endog Abang mengambil nama dari istilah "Endog Abang" yang memiliki makna khusus dalam budaya Jawa. Secara harfiah, Endog Abang berarti telur merah. Nama ini dipilih dengan pertimbangan simbolis yang dalam dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Telur merah yang menjadi bagian dari Garebeg Mulud, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah makanan khas yang memiliki makna tersendiri dalam perayaan keagamaan dan budaya di Yogyakarta. Tradisi Endog Abang yang hanya muncul dalam perayaan-perayaan tersebut menunjukkan keunikan dan keistimewaan budaya yang dilestarikan di Yogyakarta. Dulu, makanan ini sering diperjualbelikan di pasar rakyat di Alun-Alun Utara Yogyakarta sebagai bagian dari upaya memeriahkan acara Garebeg. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan pergeseran kegiatan, geliat ekonomi rakyat yang terkait dengan Endog Abang mulai terhenti.

Dengan mengambil nama Endog Abang sebagai bagian dari Manifesto, Partai Umat DIY menghadirkan simbolisasi yang mengingatkan akan nilai-nilai tradisional dan keunikan budaya yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



terkait dengan ekonomi rakyat. Meskipun geliat ekonomi ini tidak lagi seaktif dulu di pasar tradisional, namun keberadaannya tetap menjadi representasi dari semangat untuk menghidupkan kembali potensi ekonomi masyarakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, nama Manifesto Endog Abang bukan hanya sekadar istilah, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang keberagaman budaya dan semangat untuk menjaga serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam konteks modern yang terus berubah. Dalam penyusunan Manifesto Endog Abang, Partai Umat mengambil pijakan dari Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta sebagai landasan utama. Dokumen undang-undang tersebut menjadi rujukan yang sangat penting dalam merumuskan visi, misi, dan strategi partai dalam konteks politik lokal DIY. Yang menjadi poin sentral dari manifesto ini adalah penekanan pada pasal 5 tentang tujuan keistimewaan DIY, khususnya ayat 1 yang mengatur Pengaturan Keistimewaan DIY.

Ayat 1 dari pasal 5 tersebut menjelaskan bahwa pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk dua hal utama. Pertama, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis di wilayah tersebut. Kedua, untuk mencapai kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Dengan kata lain, keistimewaan DIY tidak hanya mengacu pada aspek politik, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan erat dengan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat DIY. Selain itu, ayat 3 dari pasal yang sama juga menegaskan bahwa kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, akan diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah DIY untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh agar mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan DIY ini, Partai Umat mengambil langkah strategis dengan menyusun Manifesto Endog Abang sebagai panduan utama dalam mewujudkan visi dan misi partai untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat DIY secara menyeluruh. Manifesto ini tidak hanya berfokus pada aspek politik semata, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan sosial, ekonomi, dan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Manifesto Endog Abang menggambarkan kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan kebudayaan di Yogyakarta, khususnya dalam konteks Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah ini. Konsep ini mencerminkan sejarah dan identitas yang kuat di Yogyakarta, di mana jabatan politik sebagai Gubernur dan jabatan kultural sebagai Raja (atau Sultan) memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini tidak hanya mencerminkan tatanan politik dan budaya yang unik di DIY, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan Jawa yang menghargai harmoni dan keselarasan antara berbagai unsur kehidupan.

Dalam Manifesto Endog Abang, penekanan diberikan pada pentingnya menjaga kesinambungan antara aspek politik dan budaya dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan keistimewaan. Alokasi dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan aspek kultural, seperti kesultanan atau kraton, dianggap sebagai bagian integral dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, pentingnya tidak memisahkan diri dari prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dan kesejahteraan juga ditekankan dalam manifesto ini.

Kontras antara nilai-nilai kebudayaan dan kepentingan masyarakat menjadi fokus utama dalam Manifesto Endog Abang. Meskipun kebudayaan memiliki nilai penting dalam identitas suatu daerah, namun hal-hal yang bertentangan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dinilai ulang atau bahkan dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang sejati adalah yang mampu menghargai dan mengakomodasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya aspek-aspek simbolis atau estetis semata.

Manifesto ini juga mengangkat tema penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan yang diambil. Dengan memahami bahwa kesejahteraan sosial dan spiritual merupakan satu kesatuan, Manifesto Endog Abang menekankan pentingnya kebijakan yang memperhatikan aspek kemanusiaan dan spiritualitas dalam rangka menciptakan kondisi yang adil, sejahtera, dan harmonis bagi seluruh warga masyarakat Yogyakarta.

Manifesto Endog Abang juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan dalam konteks pembangunan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi warga. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi negara, khususnya alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam manifesto ini, disoroti bahwa kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan harus senantiasa diingatkan melalui mekanisme checks and balances yang merupakan pondasi dari negara demokrasi. Mekanisme ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan pemerintah selaras dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat.

Dengan menekankan perlunya pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan, Manifesto Endog Abang memberikan pijakan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menghindari terjadinya ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menghambat upaya menuju kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Partai Ummat DIY menjalankan serangkaian langkah strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan Manifesto Endog Abang sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu langkah kunci adalah melalui proses musyawarah Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang digelar pada tanggal 29 April 2023 M, yang bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1444 H dalam penanggalan Islam.

Dalam rapat tersebut, Partai Ummat DIY secara tegas memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Mereka meyakini bahwa dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui bermunajat, mereka akan mendapatkan kekuatan dan petunjuk untuk melangkah menuju tujuan perjuangan yang sesuai dengan aspirasi rakyat, khususnya kelompok dhuafa dan mustadz'afin.

Manifesto Endog Abang yang dihasilkan dari rapat tersebut menjadi panduan utama bagi Partai Ummat DIY dalam memberikan masukan, kritik, dan penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka sadar akan peran pentingnya dalam proses pembangunan dan pengawasan kebijakan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah berdampak positif bagi seluruh masyarakat, terutama yang berada pada lapisan masyarakat yang rentan dan membutuhkan perlindungan lebih.

Selain itu, Partai Ummat DIY juga mengambil peran aktif dalam membangun kesadaran akan nilai-nilai kultural dan budaya yang mengedepankan penghargaan terhadap kemanusiaan. Mereka percaya bahwa keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat nilai-nilai kebudayaan yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam semangat persatuan dan kesatuan.

Dengan demikian, partisipasi dan kontribusi nyata Partai Ummat DIY dalam proses pembangunan dan pengawasan kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pilar penting dalam upaya menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan merata bagi seluruh warga, sesuai dengan amanah konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan negara.

Pada poin pertama, Manifesto Endog Abang dengan tegas menegaskan bahwa negara tidak boleh absen atau lengah dalam upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya. Pernyataan ini didasarkan pada realitas yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana persoalan kemiskinan masih tinggi dan tingkat ketimpangan sosial, yang diukur melalui indikator seperti gini ratio, melebihi angka nasional. Hal ini menjadi indikasi bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah belum mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan, terutama bagi lapisan masyarakat yang berada di bawah, kelompok dhuafa, dan mustadz'afin.

Keadaan ini menjadi perhatian serius bagi Partai Ummat DIY, karena menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan antara berbagai kelompok masyarakat. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan ini dapat menyebabkan perpecahan sosial dan merugikan bagi masyarakat yang sudah berada dalam kondisi rentan.

Dalam konteks ini, Manifesto Endog Abang menggarisbawahi perlunya tindakan konkret dari pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada mereka yang membutuhkan perlindungan dan dukungan lebih besar. Partai Ummat DIY menegaskan bahwa masyarakat kecil bawah, kelompok dhuafa, dan mustadz'afin harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan dan kebijakan sosial yang dirumuskan oleh pemerintah.

Dengan demikian, Manifesto Endog Abang memperkuat komitmen Partai Ummat DIY dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi bagi seluruh warga, serta menekankan pentingnya keadilan distributif sebagai landasan utama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Selanjutnya pada poin kedua, Manifesto Endog Abang menyoroti pentingnya penggunaan dana keistimewaan sesuai dengan amanah konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan. Dana ini dianggap sebagai tanggung jawab besar yang harus dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial yang terus meningkat setiap tahun.

Penggunaan dana keistimewaan haruslah sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana alokasi dan penggunaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan bantuan sosial dan ekonomi. Partai Ummat DIY menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana keistimewaan ini, sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas manfaat yang diperoleh dari alokasi tersebut.

Selain itu, Manifesto Endog Abang juga menggarisbawahi pentingnya menghentikan atau mengurangi urusan yang tidak mendesak dan tidak relevan dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi upaya untuk mengembalikan fokus pada esensi Undang-Undang Keistimewaan, yaitu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Manifesto Endog Abang mengajukan pandangan yang jelas dan tegas terkait pengelolaan dana keistimewaan, yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan amanah konstitusi untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat DIY.

Poin ketiga dalam Manifesto Endog Abang menggarisbawahi betapa pentingnya peran Raja dan Gubernur dalam menjaga harmoni antara aspek budaya, kebijakan, dan kesejahteraan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kedua jabatan tersebut bukan hanya sekadar simbol kebudayaan dan politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, Manifesto Endog Abang menekankan perlunya arahan yang bijaksana dari Raja dan Gubernur dalam merumuskan kebijakan yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat secara menyeluruh. Arahan tersebut haruslah bersifat holistik, mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang kaya dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Selain memberikan arahan, Raja dan Gubernur juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara kepentingan kultural dengan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini termasuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar dan hak-hak masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Di samping itu, Manifesto Endog Abang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan. Raja dan Gubernur diharapkan dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mengakomodasi berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

Dengan demikian, peran Raja dan Gubernur dalam konteks Manifesto Endog Abang tidak hanya sebatas sebagai pemimpin simbolis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat DIY. Hal ini melibatkan kolaborasi yang erat antara kebijakan kultural, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga DIY.

Poin keempat dalam Manifesto Endog Abang mencerminkan pemahaman yang dalam akan pentingnya ekonomi rakyat sebagai tulang punggung kemakmuran masyarakat. Manifesto ini menggarisbawahi bahwa pusat-pusat ekonomi yang berbasis pada rakyat harus diberdayakan dan

dikembangkan secara optimal sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pusat-pusat ekonomi rakyat, seperti pasar tradisional, warung makan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kreatif lokal, menjadi simbol kehidupan ekonomi masyarakat yang beragam di DIY. Namun, dalam beberapa kasus, kebijakan pembangunan yang kurang berpihak kepada rakyat atau dominasi investasi besar-besaran dapat mengancam keberlangsungan dan perkembangan pusat-pusat ekonomi rakyat ini.

Manifesto Endog Abang menegaskan bahwa pengembangan ekonomi rakyat harus menjadi fokus utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan DIY. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan sosial dan upaya mengurangi kesenjangan ekonomi yang menjadi perhatian utama bagi Partai Ummat DIY. Dalam konteks ini, pemerintah DIY diharapkan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi rakyat, seperti memberikan insentif bagi UMKM lokal, memfasilitasi akses permodalan yang terjangkau, serta meningkatkan infrastruktur dan layanan pendukung yang memadai.

Selain itu, Manifesto ini juga menyoroti pentingnya menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya lokal. DIY memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dan pelestarian nilai-nilai budaya ini haruslah menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperkuat ekonomi rakyat secara berdampingan dengan melestarikan kearifan lokal, DIY dapat menciptakan identitas yang kuat, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, menjaga eksistensi pusat-pusat ekonomi rakyat juga menjadi langkah strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi lokal. Dengan demikian, Manifesto Endog Abang tidak hanya mengajak untuk memperhatikan pusat-pusat ekonomi rakyat sebagai entitas bisnis semata, tetapi juga sebagai entitas sosial dan budaya yang mencerminkan jati diri masyarakat DIY.

Manifesto Endog Abang mencerminkan pandangan mendalam tentang bagaimana kepemimpinan harus berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Poin kelima dari manifesto ini, yang menyoroti konsep "tahta untuk rakyat," menjadi titik sentral yang membedakan pendekatan Partai Ummat dalam membangun hubungan antara pemerintahan dan rakyatnya.

Dalam konteks ini, "tahta" bukan hanya merupakan lambang kekuasaan, tetapi juga representasi dari tanggung jawab moral dan spiritual yang harus diemban oleh setiap pemimpin. Manifesto ini menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat DIY. Pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang memiliki kedekatan batin dengan rakyat, mampu mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak berdasarkan kebutuhan riil yang dihadapi oleh masyarakat.

Poin penting yang dicakup dalam Manifesto Endog Abang adalah pemahaman bahwa kepemimpinan tidak dapat terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Sebuah pemimpin yang sesungguhnya adalah yang tidak hanya memahami aspek teknis pemerintahan, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam kepemimpinan. Hal ini tercermin dalam panggilan Manifesto untuk menjadikan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Selain itu, Manifesto ini juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Konsep "tahta untuk rakyat" bukanlah sekadar slogan, melainkan panggilan nyata untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra sejati dalam membangun dan mengembangkan daerah ini. Keterlibatan rakyat dalam pembangunan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan dan keadilan yang diinginkan.

Dengan mengusung nilai-nilai tersebut, Manifesto Endog Abang tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga sebuah komitmen yang mendalam dari Partai Ummat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Pemimpin yang dihasilkan dari semangat manifesto ini diharapkan mampu memimpin dengan kearifan, integritas, dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan seluruh masyarakat DIY.

a. Identitas Pembeda

Asal usul nama "Partai Ummat" menandai sebuah perjalanan ideologis dan politik yang kompleks, menjelajahi ruang yang luas dari identitas agama hingga narasi politik populis anti-elit. Dalam prosesnya, nama ini tidak hanya menjadi sebuah label, tetapi juga menandakan komitmen mendalam terhadap nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Partai Ummat dalam panggung politik Indonesia.

Pertama-tama, makna mendalam dari identitas Islam yang tersirat dalam nama "Partai Ummat" mencerminkan kedalaman spiritual dan moral yang menjadi pijakan bagi pandangan politik dan pembentukan kebijakan partai. Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, membawa nilai-nilai universal tentang keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan yang menjadi landasan bagi upaya Partai Ummat dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Lebih jauh, penggunaan kata "ummat" tidak hanya mengacu pada aspek agama, tetapi juga menyoroti kesatuan, solidaritas, dan kebersamaan dalam konteks sosial dan politik. Konsep ummat secara politik mengandung makna kesadaran kolektif untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok kecil. Dengan mengidentifikasi diri sebagai "Partai Ummat," partai ini mengungkapkan tekadnya untuk menjadi wakil dan pelindung kepentingan luas masyarakat Indonesia.

Selain itu, narasi politik populis anti-elit yang diusung oleh Partai Ummat menunjukkan pandangan kritis terhadap struktur kekuasaan yang dinilai terlalu terpusat pada kelompok elit atau kepentingan sempit. Dengan mengambil sikap yang berpihak pada rakyat jelata, partai ini menegaskan komitmennya untuk mendengar suara dan aspirasi masyarakat yang seringkali terpinggirkan atau tidak terwakili dalam dinamika politik tradisional.

Dalam konteks yang lebih luas, asal usul nama "Partai Ummat" juga mencerminkan evolusi politik di Indonesia, di mana semakin banyak partai yang berusaha mengartikulasikan nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, dan keadilan dalam program-program politiknya. Dengan demikian, nama ini menjadi lebih dari sekadar identitas, tetapi juga menjadi simbol dari semangat perubahan dan transformasi dalam tatanan politik yang terus berkembang.

Dalam esensi yang lebih mendalam, asal usul nama "Partai Ummat" adalah refleksi dari semangat untuk membangun politik yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah dinamika politik yang kompleks, Partai Ummat memegang peran penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat luas, menghubungkan antara kepentingan politik dan moralitas, serta menjadi agen perubahan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Partai Ummat dalam menjalankan kampanye "keluar dan berbicara dengan penduduk setempat" mengimplementasikan pendekatan yang holistik dan terperinci dalam mendengarkan suara rakyat serta mengidentifikasi perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Langkah ini melibatkan berbagai tahapan yang mencakup riset mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik di berbagai wilayah, dialog interaktif dengan beragam kelompok masyarakat, serta pengembangan program-program yang responsif terhadap aspirasi yang diungkapkan.

Pertama-tama, dalam proses riset, Partai Ummat melibatkan tim ahli yang terdiri dari pakar-pakar bidang sosial, ekonomi, dan politik untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai isu yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Risiko riset ini mencakup survei, wawancara, dan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan akurat tentang kebutuhan, tantangan, dan harapan yang dihadapi oleh masyarakat.

Selanjutnya, melalui dialog interaktif dengan berbagai kelompok masyarakat, Partai Ummat membuka ruang bagi partisipasi aktif dari warga dalam mengekspresikan pandangan, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Dialog ini tidak hanya berlangsung dalam format pertemuan formal, tetapi juga melalui pertukaran informasi dan ide secara informal di berbagai arena komunitas, seperti acara-acara sosial, kegiatan keagamaan, dan pertemuan kelompok-kelompok kecil.

Selain itu, Partai Ummat juga mengadakan forum-forum diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat, untuk mendiskusikan isu-isu penting yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial. Forum-forum ini menjadi sarana untuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



menggalang dukungan dan pemahaman bersama tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat serta upaya yang dapat dilakukan untuk membangun solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari hasil riset, dialog, dan forum-forum diskusi tersebut, Partai Ummat kemudian mengembangkan program-program konkret yang diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi dan memenuhi kebutuhan yang diungkapkan oleh masyarakat. Program-program ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti ketersediaan sumber daya, keberlanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi dan evaluasi program.

Melalui pendekatan ini, Partai Ummat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat, menjadikan suara rakyat sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang relevan dan bermanfaat bagi kemajuan bersama. Dengan demikian, kampanye "keluar dan berbicara dengan penduduk setempat" bukan hanya merupakan slogan kosong, tetapi merupakan komitmen nyata untuk memberdayakan suara rakyat dan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai inti dari praktek politiknya.

Partai Ummat mengadopsi semboyan "Lawan Kezaliman dan Tegakkan Keadilan" sebagai manifestasi dari komitmen mereka untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Semboyan ini mencerminkan visi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Partai Ummat dalam membangun sebuah masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Selain itu, logo partai yang dikenal dengan nama "Perisai Tauhid" juga menjadi simbol yang sangat penting dalam menggambarkan identitas Islam dari Partai Ummat. Tauhid sendiri merupakan konsep dasar dalam ajaran Islam yang menggarisbawahi keyakinan akan keesaan Allah SWT. Dengan menggunakan simbol "Perisai Tauhid", Partai Ummat menegaskan bahwa nilai-nilai tauhid menjadi landasan utama dalam setiap langkah politik dan kebijakan yang mereka ambil.

Strategi populisme yang diadopsi oleh Partai Ummat juga menjadi bagian integral dari identitas pembeda mereka. Populisme merupakan pendekatan politik yang menekankan pada peran serta aktif rakyat dalam proses politik, serta menitikberatkan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat luas. Dengan menggunakan strategi ini, Partai Ummat mampu meraih dukungan massa dengan menggandeng berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok dhuafa dan mustadz'afin yang seringkali terpinggirkan dalam kebijakan politik mainstream.

Dengan demikian, kombinasi dari semboyan "Lawan Kezaliman dan Tegakkan Keadilan", logo "Perisai Tauhid", dan strategi populisme menjadi identitas pembeda yang kuat bagi Partai Ummat. Mereka tidak hanya mengedepankan nilai-nilai Islam dalam pandangan politiknya, tetapi juga memberdayakan suara rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial sebagai pilar utama dalam agenda politik dan kebijakan yang mereka usung.

Partai Ummat membawa visi yang luas dan mendalam, yang melampaui batas-batas kepentingan partai semata. Visi mereka mencakup cita-cita besar untuk Indonesia sebagai negeri yang diatur oleh prinsip-prinsip yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana tercantum dalam konsep "Baladun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur". Konsep ini menekankan pentingnya negara yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang baik dan penuh rahmat.

Dalam menjalankan visi ini, Partai Ummat menekankan beberapa nilai utama yang menjadi landasan bagi misi politik mereka. Pertama adalah Ukhuwah (Persaudaraan Ummat), yang menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Persaudaraan umat menjadi pondasi kuat dalam membangun solidaritas dan kekuatan bersama untuk meraih tujuan bersama yang lebih besar.

Kedua, Hurriyah (Kebebasan), menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh Partai Ummat. Mereka menekankan pentingnya kebebasan individu dalam berekspresi, berpendapat, dan beraktivitas tanpa adanya penindasan atau pembatasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menghormati martabat manusia.

Selanjutnya, nilai Musawah (Kesamaan) menjadi landasan penting dalam visi Partai Ummat. Mereka memperjuangkan kesetaraan di semua lini kehidupan, mulai dari kesetaraan hak-hak sosial, ekonomi, hingga kesetaraan dalam pemerataan kemajuan dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat.

Terakhir, konsep 'Adaalah (Keadilan), menjadi fokus utama dalam misi politik Partai Ummat. Mereka menegaskan pentingnya sistem yang adil dan merata bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keadilan menjadi fondasi yang harus diwujudkan untuk mencapai cita-cita besar Indonesia sebagai negara yang berdiri kokoh di atas prinsip-prinsip Ilahi dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Dengan visi yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial, Partai Ummat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan wacana politik yang berorientasi pada nilai-nilai universal dan kesejahteraan bersama. Manifesto Endog Abang, dalam konteks ini, menjadi wujud nyata dari komitmen partai ini untuk menjalankan visi besar mereka dalam mengawal Indonesia menuju arah yang lebih baik dan berkeadilan.

b. Kesenjangan Sosial-ekonomi

Polemik mengenai kepemilikan tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi isu sentral yang diangkat oleh Partai Ummat dalam konteks politik mereka. Hal ini terutama terjadi setelah penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, yang semestinya ditujukan untuk mengukuhkan status keistimewaan Yogyakarta, justru menimbulkan polemik baru terkait kepemilikan tanah. Di bawah undang-undang tersebut, Kasultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai Badan Hukum Kebudayaan dengan hak kepemilikan atas Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond. Namun, hal ini berdampak pada warga keturunan Tionghoa dan warga desa di wilayah yang klaim tanahnya termasuk dalam Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond, yang kehilangan pengakuan sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak-hak kewargaan terkait pemilikan dan penggunaan tanah di daerah tersebut.

Isu kepemilikan tanah yang dipolitisasi ini kemudian memunculkan politics of recognition, di mana ada ketidakmengakuan terhadap hak-hak warga tertentu dalam kepemilikan dan penggunaan tanah di Yogyakarta. Tanah yang menjadi sumber polemik ini kemudian diklaim sebagai Tanah Milik Negara yang nantinya akan menjadi Tanah Milik Kesultanan atau Kadipaten dengan Hak Anggaduh berdasarkan ketentuan kolonial Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman Nomor 18 Tahun 1918, yang dihidupkan kembali dengan pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dampak dari kebijakan ini adalah munculnya serangkaian aksi penolakan publik terhadap pemberlakuan Undang-Undang Keistimewaan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya isu kepemilikan tanah di Yogyakarta dan bagaimana hal tersebut telah dipolitisasi oleh berbagai pihak, termasuk Partai Ummat, untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

c. Target Mobilisasi

Manifesto Endog Abang merupakan sebuah inisiatif yang digagas oleh Pak Ketua DPD, Dwi Kuswantoro, sebagai respons terhadap kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masih memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tinggi, meskipun sering dipuji karena tingkat kebahagiaannya yang relatif tinggi. Hal ini menciptakan ironi bagi masyarakat Jogja, di mana meskipun terdapat kebahagiaan yang tinggi, namun kondisi sosial-ekonomi yang tidak merata masih menjadi persoalan yang perlu ditangani. Salah satu fokus Partai Ummat dalam Manifesto Endog Abang adalah untuk menggerakkan dan membawa perubahan bagi kelompok masyarakat Islam dan masyarakat rentan yang merasa tidak mendapatkan keadilan sosial dan ekonomi yang seharusnya. Dengan melihat kondisi DIY yang masih memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial, Partai Ummat berusaha untuk menarik perhatian dan dukungan dari kelompok-kelompok ini untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Ironisnya, tingkat kebahagiaan yang tinggi di DIY tidak selalu mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi semua warganya. Terkadang, tingkat penerimaan atau kepasrahan masyarakat terhadap kondisi sosial-ekonomi yang ada dapat menjadi hambatan dalam upaya untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Manifesto Endog Abang menjadi panggilan untuk tidak hanya menerima situasi yang ada, tetapi juga untuk bertindak dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Partai Ummat melakukan identifikasi terhadap

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



kelompok-kelompok masyarakat yang merasakan ketidakadilan sosial dan ekonomi, dengan harapan dapat memobilisasi dukungan dan partisipasi aktif dari mereka dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan yang lebih merata bagi semua warga DIY.

Partai Ummat, yang didirikan dengan tujuan melawan kezaliman struktural yang menciptakan ketidakadilan sosial-ekonomi, merasa bahwa perubahan yang diinginkan harus dilakukan melalui jalur struktural. Mereka berusaha mempengaruhi kebijakan politik agar lebih berkeadilan, dengan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang belum terwakili dengan baik dalam kebijakan publik yang ada. Menyadari bahwa kondisi mayoritas masyarakat masih hidup dalam keadaan yang belum tercerahkan mengenai potensi perubahan yang dapat mereka capai, Partai Ummat juga aktif dalam melakukan penyadaran kepada masyarakat melalui gerakan politiknya. Mereka mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa kondisi yang ada harus diubah dan bahkan dilawan jika diperlukan. Dalam hal ini, Partai Ummat berperan sebagai agen perubahan yang berusaha untuk mengubah paradigma dan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya perubahan menuju keadilan sosial-ekonomi yang lebih merata.

Melalui gerakan politiknya, Partai Ummat juga berusaha menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya menciptakan perubahan struktural yang lebih besar. Mereka menyampaikan visi dan misi mereka secara terbuka kepada masyarakat, mengajak untuk bersama-sama berperan dalam membangun keadilan sosial-ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Partai Ummat tidak hanya menjadi wadah aspirasi politik, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial yang berupaya membangun kesadaran dan aksi bersama untuk perubahan yang lebih baik. Partai Ummat, dengan basis kekuatan yang berasal dari kalangan Muhammadiyah dan lebih luas lagi kalangan Islam modernis atau revivalis, mengambil pendekatan yang khusus dalam menawarkan gagasan-gagasan politiknya kepada segmen masyarakat tersebut. Ini didasarkan pada prediksi bahwa segmen ini, yang mayoritas telah memiliki kesadaran terhadap agenda politik yang ditawarkan oleh Partai Ummat, mungkin lebih responsif daripada segmen lain seperti kalangan tradisional Jawa, Islam tradisional, atau kalangan nasionalis marhaenis.

Kelebihan ini berakar pada kenyataan bahwa kalangan Muhammadiyah dan Islam politik lainnya sudah terbiasa dengan diskursus amar ma'ruf nahi mungkar, terutama setelah gerakan reformasi yang dipelopori oleh tokoh seperti Pak Amien Rais. Partai Ummat berharap bahwa dengan memfokuskan upaya mobilisasi politiknya pada segmen pemilih ini, maka agenda politiknya dapat diadopsi dan dipahami oleh kalangan lain melalui penawaran program-program yang lebih rasional dan relevan dengan kebutuhan dan harapan hidup mereka. Dengan pendekatan yang terarah dan strategis terhadap segmen masyarakat yang telah memiliki tingkat kesadaran dan keterampilan politik yang lebih tinggi, Partai Ummat berpotensi memperluas basis dukungannya ke kalangan yang lebih luas. Hal ini juga memungkinkan partai untuk memperkuat posisinya dalam membawa agenda-agenda politik yang berkaitan dengan keadilan sosial-ekonomi dan nilai-nilai Islam ke dalam pusaran perdebatan dan kebijakan publik secara lebih efektif dan substansial.

d. Pendirian Partai dan Ketersediaan Program

Partai Ummat di DIY mengambil posisi yang kritis terhadap rezim nasional yang saat ini berkuasa. Mereka menyoroti kebijakan ekonomi yang dianggap serampangan, yang cenderung menguntungkan oligarki ekonomi sementara memberikan kebijakan-kebijakan sosial yang hanya bersifat semu dan menyenangkan dalam jangka pendek, seperti bantuan sosial (bansos) dan kebijakan karitatif lainnya. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini justru dianggap dapat memperpetuasi kesenjangan ekonomi yang ada bahkan memperparahnya. Oleh karena itu, Partai Ummat menawarkan alternatif kebijakan yang berbeda secara fundamental dari kebijakan pemerintah nasional saat ini. Mereka mengusung program-program yang bertujuan untuk mengatasi struktur ekonomi yang tidak adil dan meratakan kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat. Program-program ini ditekankan untuk memberdayakan masyarakat kecil bawah, dhuafa, dan mustadz'afin agar dapat menikmati hak-hak ekonomi dan sosial yang layak, serta mendapatkan perlindungan yang adil dari negara.

Dengan pendekatan yang anti-tesa terhadap kebijakan pemerintahan nasional saat ini, Partai Ummat berupaya menjadi suara yang mengkritisi ketidakadilan struktural yang terjadi dalam sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi partai untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang berdasarkan pada nilai-nilai Ilahiyah, Ukhuwah, Hurriyah, Musawah, dan 'Adaalah, yang diharapkan akan membawa perubahan yang positif dan signifikan bagi kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara. Partai Ummat di DIY harus mempertimbangkan dengan hati-hati strategi mereka, terutama karena mereka menghadapi rezim kultural yang memiliki pengaruh kuat, terutama di kalangan masyarakat bawah. Dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama di tingkat provinsi, Partai Ummat perlu mengarahkan kritiknya pada kebijakan-kebijakan konkret yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Namun, mereka juga perlu mempertimbangkan tahapannya dengan hati-hati untuk menghindari konflik yang berpotensi dengan rezim kultural yang ada.

Sebagai langkah awal, Partai Ummat bisa membatasi benturan langsung dengan rezim kultural tersebut. Mereka dapat fokus pada pengkritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang secara nyata mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat, sambil tetap menjaga dialog dan komunikasi yang terbuka dengan berbagai pihak, termasuk rezim kultural yang ada. Dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan strategis, Partai Ummat dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dari masyarakat sambil tetap memperjuangkan agenda-agenda keadilan dan kesejahteraan yang menjadi fokus utama partai tersebut. Hartadi, yang menjabat sebagai Ketua Divisi Data BPPW DPW Partai Ummat dan juga sebagai Wakil Ketua dalam kepengurusan harian DPW Partai Ummat, memberikan pandangan yang penting terkait dengan minifesto "Endog Abang" yang disampaikan oleh Ketua DPW PU pada Rakerwil 2023. Menurut Hartadi, sebagai seorang kader Partai Ummat, pandangan tersebut merupakan pandangan ideologis dan strategis yang sangat penting bagi arah Partai Ummat di DIY.

Dari sudut pandang kader Partai Ummat, manifesto tersebut bukan hanya sekadar pidato atau pernyataan kebijakan, tetapi merupakan arahan konkret yang mengarahkan langkah-langkah politik yang harus dilakukan, khususnya di DIY. Ini berarti bahwa manifesto tersebut menjadi landasan bagi semua kader PU DIY untuk melaksanakan berbagai aksi politik setelah Rakerwil PU DIY 2023. Dalam konteks ini, Hartadi memandang bahwa manifesto tersebut adalah sebuah pedoman yang mengatur cara pandang dan tindakan Partai Ummat di DIY, yang dipimpin oleh Dwi Kuswantoro sebagai Ketua DPW PU DIY. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin dan kebijakan strategis dalam membentuk arah dan gerak sebuah partai politik, terutama dalam konteks politik lokal seperti DIY. Dengan demikian, pernyataan Hartadi ini memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan internal dalam partai politik, terutama dalam hal pengarahan ideologis dan strategis dari pimpinan partai, seperti yang diwakili oleh Ketua DPW PU DIY melalui manifesto "Endog Abang".

Hartadi juga menekankan bahwa manifesto "Endog Abang" merupakan implementasi nyata dari politik identitas yang telah lama melekat pada Partai Ummat. Menurutnya, politik identitas sering kali dipandang secara negatif dan dihubungkan dengan berbagai praktik politik yang dianggap buruk. Namun, politik identitas yang diusung oleh Partai Ummat DIY melalui manifesto "Endog Abang" memiliki dua sisi yang penting. Pertama, Partai Ummat mengakui dirinya sebagai agen perubahan yang ingin memperbaiki kondisi sosial dan politik. Dalam hal ini, manifesto tersebut menjadi sarana untuk mengimplementasikan visi perubahan yang diusung oleh partai, khususnya dalam konteks DIY. Pendekatan politik identitas ini menjadi landasan bagi Partai Ummat untuk mewujudkan agenda-agenda perubahan yang dianggap penting bagi masyarakat. Di sisi lain, Partai Ummat juga tidak melupakan nilai-nilai positif dan tradisi yang sudah baik yang telah menjadi bagian dari masyarakat. Mereka menyadari pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah terbukti bermanfaat dan menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Dalam konteks politik identitas, hal ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dan menyeluruh, di mana Partai Ummat tidak hanya fokus pada perubahan radikal, tetapi juga menghargai dan mempertahankan hal-hal yang sudah terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, pandangan Hartadi menunjukkan bahwa manifesto "Endog Abang" bukan hanya sekadar alat politik identitas yang statis, tetapi lebih sebagai instrumen yang dinamis untuk mencerminkan visi perubahan yang inklusif dan seimbang antara pembaharuan dengan pemeliharaan nilai-nilai tradisional yang baik. Lebih lanjut lagi, Hartadi menegaskan bahwa Partai Ummat tidak akan

mengabaikan atau meninggalkan semua tradisi dan kearifan lokal yang ada. Pandangan bahwa Partai Ummat hanya ingin melakukan perubahan secara radikal dan menghapuskan semua tradisi yang sudah ada adalah tidak benar. Sebaliknya, perubahan yang diinginkan oleh Partai Ummat adalah terutama terkait dengan menghapus kezoliman yang sudah menjadi bagian dari struktur yang mengakar di dalam negara ini.

Dengan demikian, tradisi dan kearifan lokal yang tidak bermuara pada kezoliman tidak akan dirubah oleh Partai Ummat. Bahkan, mereka akan terus dilestarikan dan dihargai sebagai bagian dari identitas dan nilai-nilai yang baik. Salah satu contoh nyata dari pendekatan ini adalah manifesto "Endog Abang" yang diusung oleh Partai Ummat. Tradisi "Endog Abang" di Yogyakarta, yang menjadi inspirasi manifesto tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip living value yang diperjuangkan oleh Partai Ummat. Dengan demikian, manifesto "Endog Abang" yang disampaikan oleh Ketua DPW PU DIY merupakan sebuah penegasan terhadap posisi ideologis dan politis Partai Ummat, khususnya di DIY, dalam konteks politik lokal. Ini menunjukkan bahwa Partai Ummat tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga menghargai dan mengakui nilai-nilai positif yang ada dalam tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang mereka perjuangkan.

KESIMPULAN

Dari diskusi awal tentang teori populisme yang menyoroti identitas politik dan narasi anti-elit, hingga analisis terperinci tentang Manifesto Endog Abang, serta pemaparan mengenai mobilisasi dan program-program Partai Ummat, kesimpulannya dapat dijabarkan sebagai berikut: Partai Ummat muncul sebagai representasi politik dari teori populisme, dengan fokus pada identitas Islam dan narasi populis anti-elit. Mereka memanfaatkan identitas ini untuk memobilisasi kelompok masyarakat Islam dan rentan yang merasakan ketidakadilan sosial-ekonomi. Manifesto Endog Abang menjadi simbol dari pendekatan ini, mengaitkan identitas lokal dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diusung oleh Partai Ummat. Partai Ummat juga menawarkan kritik terhadap rezim nasional yang dinilai hanya menguntungkan oligarki ekonomi dan tidak memperhatikan keadilan sosial yang sebenarnya. Mereka berusaha mengubah paradigma politik dengan menawarkan program-program yang lebih rasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendirian Partai Ummat dalam menghadapi rezim kultural yang hegemonik di DIY menunjukkan strategi yang hati-hati namun tetap tegas dalam menyuarakan kritik dan mengusung perubahan. Mereka tidak hanya menawarkan perubahan struktural, tetapi juga menghargai tradisi dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang mereka perjuangkan. Dengan demikian, Partai Ummat dapat dilihat sebagai representasi nyata dari teori populisme dalam konteks politik Indonesia, dengan pendekatan yang menggabungkan identitas Islam, kritik terhadap elit politik, mobilisasi massa, dan tawaran program-program yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Bolin, N. (2007). *New Party Entrance - Analyzing the Impact of Political Institutions*. *West European Politics*, 2.
- Breyer, M. (2022). *Populist positions in party competition : Do parties strategically vary their degree of populism in reaction to vote and of fi ce loss?* 0(December 2021), 1–13. <https://doi.org/10.1177/13540688221097082>
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (11th ed.). CV Prima Grafika.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among*. Sage Publication.
- Erlingsson, G. (2005). *Varför bildas nya partier? : Om kollektivt handlande och partientreprenörer*. *Lund Political Studies*, 141. <https://www.lu.se/lup/publication/49ba0a88-6a99-4da8-b8ec-a5a0106cafb4>
- Gidron, N., & Bonikowski, B. (2013). *Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda*. <http://ssrn.com/abstract=2459387><http://www.wcfia.harvard.edu/Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abstract=2459387>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



- Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566–583. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225>
- Harmel, R. (1985). On the study of new parties. *International Political Science Review*, 6(4), 403–418. <https://doi.org/10.1177/019251218500600403>
- Mair, P. (1990). The Electoral Payoffs of Fission and Fusion. *British Journal of Political Science*, 20(1), 131–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0007123400005743>
- Manifesto Endog Abang Untuk Keadilan Sosial, DPW Partai Ummat DIY (2023).
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism Jokowi 's Rise , Democracy , and Political Contestation in Indonesia*.
- Mietzner, M. (2020a). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: chauvinists, Islamists and technocrats. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 420–438. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725426>
- Mietzner, M. (2020b). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: chauvinists, Islamists and technocrats. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 420–438. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725426>
- Mietzner, M. (2020c). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: chauvinists, Islamists and technocrats. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 420–438. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725426>
- Moleong. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nur Budiman, B., Dewi Safitri, B., Rizki Putriga, B., & Julietta Imanuella Wicaksono, V. (2022). Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal PolGov*, 4(1), 211–243. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3916>
- Rais, A. (2021). *Deklarasi Partai Ummat (live)*. Amien Rais Official. <https://www.youtube.com/watch?v=ciTrXuIeFXM>
- Urbinati, N. (2019). *Me the People : How Populism Transforms Democracy*.